

Gerakan Agama dan Politik di Mesir: Refleksi atas *Ikhwān Al-Muslimīn* dan Revolusi Pemuda *Tahrir Square* di Kairo

Muhamad Asrory Mulki

*Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina
asrorymulki@yahoo.com*

&

Herdi Sahrasad

*Pasca Sarjana Universitas Paramadina
sahrasad@yahoo.com*

Abstract: *Egyptian Revolution (Nile Revolution) in February 2011 was totally moved by the desire and struggle conducted by the Egyptian young people, without considering the tribal entity and identity, ethnic group, not even religion. The absence of Islamic yells and lack of significant role from Islamist groups, in the time of demonstration, indicated that the fascination of 'ideological Islam' has faded in the Pyramida country. In contrast, Muslim Arabian revolutionists did not anymore give priority to Islamic symbols in their socio-political great effort, other than to common values and ideals, i.e. democracy and freedom. This also occurred to Ikhwān al-Muslimīn movement, which is said now as completing a reformation of ideology and method. When previously the violation was their ultimate agenda in achieving the goal, whereas recently they have adopted a way of democracy. The experience of political-Islam depolitization in the country seemed to change Ikhwān al-Muslimīn to award superiority on negotiation and democracy.*

Keywords: *Egyptian revolution, The youth movement, Ikhwān al-Muslimīn*

Abstrak: *Revolusi Mesir (Revolusi Nil) pada Pebruari 2011 sama sekali digerakkan oleh keinginan dan perjuangan kaum muda Mesir, tanpa melihat entitas dan identitas kesukuan, kelompok, bahkan agama. Ketiadaan pekik Islam dan minim peran besar kelompok Islamis saat demonstrasi menandai daya tarik 'Islam ideologis' telah pudar di Negeri Piramida itu. Sebaliknya, kaum revolusi Arab Muslim tidak lagi mengutamakan simbol-simbol Islam dalam perjuangan sosial dan politik, tetapi lebih percaya pada nilai dan cita-cita bersama, yakni demokrasi dan kebebasan. Ini bahkan terjadi pada gerakan Ikhwān al-Muslimīn, sehingga dikatakan telah melakukan reformasi ideologi dan metode gerakan. Jika sebelumnya metode kekerasan adalah program unggulan untuk mencapai sebuah tujuan, sekarang mereka menempuh jalur demokrasi. Pengalaman depolitisasi Islam politik di negara Piramida tersebut tampak mengubah cara berpikir mereka untuk mengutamakan negosiasi dan demokrasi.*

Katakunci: *Revolusi Mesir, Gerakan kaum muda, Ikhwān al-Muslimīn*

Pendahuluan

Dalam dua dekade belakangan ini, selain demokratisasi dan hak-hak asasi manusia (HAM), diskursus yang muncul di permukaan dalam khazanah politik internasional, khususnya yang berkaitan dengan regio-politik, adalah 'kebangkitan' Islam politik yang merebak di hampir semua negara-negara Muslim di dunia. Dalam sejumlah literatur, istilah Islam politik¹ itu sendiri, baik 'funda-

Politics in the Arab World (London and New York: Routledge, 1991), Nazih Ayubi membuat taksonomi orientasi gerakan Islam ke dalam: reformisme atau modernisme Islam, salafisme, fundamentalisme, neo-fundamentalisme, Islamisme, dan Islam politik (*political Islam*.) Menurut Ayubi, reformisme Islam atau modernisme Islam (diwakili antara lain oleh al-Afghānī dan 'Abduh) berpandangan bahwa Islam adalah sistem keyakinan yang sempurna tetapi cukup fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan modern (modernitas.) Sementara salafisme menekankan kepada sumber Islam yang otentik (al-Qur'ān, Sunnah Nabi dan tradisi para generasi Muslim awal, *salaf*.) Salafisme cenderung

¹ Dalam buku *Political Islam: Religion and*

mentalisme,' 'neo-fundamentalisme' dan 'revivalisme' Islam memiliki substansi yang sulit untuk dibedakan satu sama lain. Hal ini pada akhirnya mengajak sejumlah sarjana dunia melakukan identifikasi terhadap karakter masing-masing gerakan yang sesuai dengan ideologi perjuangannya.

John L. Esposito,² misalnya, menyamakan Islam politik dengan 'fundamentalisme Islam,' sebuah istilah yang seringkali berarti

skripturalis dan tradisional, seperti direpresentasikan oleh Wahhābiyyah, Sanūsiyyah, Mahdiyyah, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Rasyīd Riḍā' dan tokoh al-Ikhwān al-Muslimūn awal, seperti Ḥassan al-Bannā. Kaum salafi cenderung kepada dogmatisme doktrinal, meskipun kadangkala secara politik fleksibel. Sedangkan fundamentalisme, hampir sama dengan salafisme, menekankan kepada sumber asli Islam (al-Qur'ān dan al-Sunnah), tetapi kurang simpatik terhadap *fiqh*. Fundamentalisme memegang pandangan holistik dan komprehensif tentang Islam (*intégrisme*—Perancis.) Islam, menurut fundamentalisme, adalah agama, dunia dan negara (*dīn, dunyā, dawlah.*) Perspektif holistik ini mengimplikasikan keharusan tindakan kolektif untuk mewujudkan totalitas Islam ke dalam kenyataan. Neo-fundamentalisme Islam adalah sempalan dari ideologi fundamentalisme. Biasanya neo-fundamentalisme memiliki orientasi yang lebih radikal dan militan. Pada umumnya, gerakan neo-fundamentalis cenderung melakukan tindakan langsung sebagai reaksi terhadap suatu kasus tertentu. Contoh dari gerakan model ini adalah *Takfir wa al-Hijrah* di Mesir dan *al-Jihād* di Mesir dan beberapa negara Arab. Ayubi menyebutkan bahwa orientasi neo-fundamentalisme ini lebih bercorak politik. Istilah Islamisme, Ayubi menyebutkan, biasanya digunakan untuk menunjuk tiga kategori gerakan Islam sekaligus: salafi, fundamentalis dan neo-fundamentalis. Islamisme tidak sekedar menekankan identitas sebagai Muslim, tetapi lebih kepada pilihan sadar terhadap Islam sebagai doktrin dan ideologi. Dan yang terakhir adalah Islam politik (*political Islam*) sering digunakan untuk merujuk kepada kategori fundamentalis dan neo-fundamentalis yang cenderung menekankan watak politik dari Islam dan terlibat dalam kegiatan anti-negara secara langsung.

² Dalam pengantar buku yang disuntingnya, *Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform?* (London: Boulder, 1997), 1-14; Lih. juga John L. Esposito, *Islam: The Straight Path*, (Oxford University Press, 1988); William Montgomery Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity* (Routledge: London and New York, 1998); Fareed Zakaria et al. (eds.), *America and the World, Debating the New Shape of International Politics* (Council on Foreign Relations.)

radikalisme militan dan kekerasan. Sementara Olivier Roy³ cenderung menafsirkan Islam politik sebagai aktivitas kelompok-kelompok yang meyakini Islam sebagai agama dan sekaligus sebagai ideologi politik yang kemudian disebutnya sebagai 'neo-fundamentalisme' atau 'fundamentalisme modern.' Meski begitu, Roy lebih suka menggunakan istilah Islamisme, yang menurutnya, merupakan bentuk paling mutakhir dari neo-fundamentalisme atau fundamentalisme modern. Karena itulah, untuk menyebut gerakan Islam politik yang dicirikan oleh orientasi yang kuat kepada politik dengan menjadikan Islam sebagai ideologi yang kemudian diperhadapkan dengan ideologi modern seperti kapitalisme, liberalisme atau sosialisme, penulis dalam penulisan tesis ini akan menggunakan istilah Islamisme sebagaimana yang digunakan Roy.

Dalam mengekspresikan Islam politik, kaum Islamis berkeyakinan bahwa Islam adalah ideologi yang mencakup semua tata nilai kehidupan, tanpa terkecuali. Islam tidak terbatas untuk kesalehan pribadi atau sekedar salah satu komponen dalam kehidupan sosial dan politik, tapi Islam adalah ideologi yang lengkap bagi kehidupan pribadi dan publik, pondasi bagi masyarakat dan negara Muslim.⁴ Senada dengan itu, William Montgomery Watt mengatakan bahwa bagi kaum Islamis, Islam adalah agama dan politik yang tidak mungkin dipisahkan seperti yang terjadi di Barat.⁵ "Syari'at Islam adalah skema kehidupan yang komplis dan tata sosial yang mencakup semua hal,"⁶ ungkap sang Islamis.

Gerakan Islamis, seperti yang disebut di atas, di mana agama dan politik bagi mereka seperti satu keping mata uang yang

³ Dalam bukunya, *The Failure of Political Islam* (Harvard University Press, 1996), xix.

⁴ Esposito, *Islam: The Straight Path*, 185.

⁵ Montgomery Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity*, 119

⁶ Mawlānā Abū al-'Alā Mawdūdī, *The Islamic Law and Constitution* (Lahore, Pakistan: Islamic Publications, 1977), 5.

saling berkaitan, muncul pertama kali pada abad ke-18 dan ke-19. Kemunculannya untuk menunjukkan kekuatan sebuah seruan kepada Islam untuk memberikan penalaran atas kemunduran umat di berbagai bidang dan untuk memulai gerakan-gerakan yang bertekad melakukan reformasi sosial dan moral secara keseluruhan. Di samping itu, ia juga sebagai alat perjuangan untuk menghadapi kolonialisme Barat yang kian mencengkram negara-negara Muslim di dunia,⁷ terutama sekali setelah kekalahan memalukan Dunia Arab (Islam) dari Israel hanya dalam waktu enam hari saja. Peristiwa ini cukup menampar wajah negara-negara Islam di dunia.

Karena itu, bagi dunia Islam sendiri, Perang Enam Hari dengan Israel yang digelar pada tahun 1967 menghasilkan suatu periode perenungan dan otokritik ketika Muslim mencoba untuk memahami mengapa dan bagaimana mereka mencapai titik nol ini dalam sejarah mereka. Kekalahan telak kekuatan gabungan Mesir, Syiria, dan Yordania hanya dalam enam hari dan hilangnya wilayah mereka yang luas (Tepi Barat, khususnya Yerusalem Timur, Gaza dan Dataran Tinggi Gola) menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kekuatan-kekuatan rezim Arab dan kebijakan nasionalisme mereka. Lebih penting lagi, kehilangan Yerusalem, kota suci

⁷ Dalam melawan hegemoni dan dominasi Barat di dunia Muslim, para intelektual dan ulama Muslim seperti Sayyid Jamāluddīn al-Afghānī dan Muḥammad ‘Abduh menyerukan sebuah pembaruan dan interpretasi baru Islam diperlukan dalam masyarakat Islam. Dan perubahan yang mereka sarankan dimaksudkan untuk menjumbuhkan Islam dan modernitas, bukan pemahaman Islam yang tradisional, yang menolak demokrasi dan produk-produk modernitas yang baik. Karena itulah keduanya, berupaya mengembangkan kemerdekaan individual, keadilan sosial, dan kebebasan politik yang berasas pada kebaikan umat. Tentang Afghānī mengenai ini, lih. Nikki R. Keddie, *An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writing of Sayyid Jamāl al-Dīn al-Afghānī* (Berkeley: University of California Press, 1983); dan tentang ‘Abduh, lih. Yvonne Haddad, *Muḥammad ‘Abduh: Pioneer of Islamic Reform* (London: Zed, 1994.)

Islam ketiga, dan tempat-tempat sucinya, adalah pukulan telak terhadap kebanggaan kaum Muslim dan agama Islam.⁸ Peristiwa ini tentu saja telah mengawali krisis percaya diri dan identitas pada kaum Muslim dunia. Dan pada akhirnya, hal itu mengubah masalah Arab dan Palestina menjadi masalah Islam secara keseluruhan.

Sejak saat itulah gerakan Islamis bermunculan subur di belahan dunia Muslim dengan berpandangan bahwa masyarakat hanya bisa dimerdekakan dari penindasan kaum penjajah, seraya mengislamkan mereka (masyarakat Islam), hanya dengan cara aktivitas sosial dan politik: perlu keluar dari masjid. Gerakan Islamis lebih memilih terlibat langsung dalam kehidupan politik dan mereka optimis dapat mengembalikan kejayaan yang pernah diraihnyanya.⁹ Sejak tahun 1960an beberapa kali mereka mencoba meraih kekuasaan. Gerakan Islamis memiliki argumen politik yang berpijak pada asas bahwa Islam adalah sistem pemikiran global dan menyeluruh (*a global and synthesizing system of thought*).¹⁰ Menurut mereka, masyarakat yang terdiri dari orang-orang Islam saja tidak cukup, tetapi juga harus Islami dalam landasan maupun

⁸ Esposito, *Islam: The Straight Path*, 199.

⁹ Sejak diterbitkan karya Oswald Spenger, *The Decline of the West* (1918), yaitu buku yang menggambarkan keruntuhan peradaban Barat, banyak Muslim menjadikan buku tersebut sebagai slogan politik untuk meyakinkan diri, bahwa di bawah arahan pemerintahan Islam yang otentik, dunia Islam akan segera mengejar Barat dan mewarisi semangat peradaban mereka.

¹⁰ Karena itulah Muḥammad Sa‘īd al-Asymāwī dalam kitabnya *al-Islām al-Siyāsī* (Kairo: Dār Sīnā, 1987)—sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Islam and the Political Order* (Washington: 1994)—mengkritik pandangan ‘Pan-Islamisme’ (*al-Qawmiyyah al-Islāmiyyah*) yang memaksudkan Islam menjadi ikatan kuat di antara kaum Muslim, dengan menghapuskan semua kesetiaan kepada negara atau bangsa. Bagi al-Asymāwī, Islam adalah agama yang terbuka untuk semua, tanpa diskriminasi. Memerjuangkan Pan-Islamisme berarti sudah mereduksi makna keuniversalan Islam menjadi nasionalisme (*qawmiyyah*) semu dan bertentangan dengan watak Islam yang *rahmatan li al-‘ālamīn*.

strukturnya.

Serangan ideologi dan dominasi Barat (neo-kolonialisme) di seluruh belahan dunia, tak terkecuali dunia Islam, berdampak cukup besar khususnya pada keterbelakangan politik dan ekonomi yang menggugah identifikasi emosional umat Islam. Dampak lain modernisasi yang dibawa oleh arus westernisasi (neo-kolonialisme) adalah rasionalisasi pemikiran keagamaan beberapa kalangan Islam, khususnya mereka yang mendapat kesempatan belajar di Barat. Rasionalisme tersebut menyatu dengan doktrin Islam yang puritan sehingga mereka menekankan rasionalitas kaidah-kaidah keagamaan (*the rationality of religious prescriptions.*) Dan fenomena rasionalisme militan ini sebagai pertanda bahwa modernisme telah menjadi inti wacana Islamisme.¹¹

Di saat modernisme menjalar liar di perhelatan dunia Islam, pemikiran keagamaan kaum Muslim mengarah pada pembacaan Islam yang terkuras untuk pembelaan terhadap Islam yang repetitif, tidak kritis, dan tidak demonstratif, karena menurut mereka, Islam memiliki jawaban atas semua masalah dunia modern. Mereka—kaum Islamis—saat ini berada pada tahap ‘kekecewaan terhadap dunia’ (*disenchantment of the world.*) Dengan menolak westernisasi yang sudah terjadi, mereka mengungkapkan mitos otentisitas kembali yang terdapat dalam diri dan pengalaman masa lalu mereka.

Penolakan ideologi dan dominasi Barat yang meresap ke hampir seluruh jantung pertahan dunia Islam dihadapi oleh kaum Islamis dengan reaktif. Kaum Islamis tidak mau mengambil sikap defensif, berdamai, maupun apologetik seperti banyak kalangan ‘modernis’ Muslim yang mau menunjukkan kemoderenan Islam dengan menggunakan ukuran nilai dan konsep-konsep Barat. Bagi kaum Islamis, persoalannya bukanlah untuk

menunjukkan bahwa Islam mewujudkan nilai universal secara sempurna, melainkan sebaliknya, Islamlah nilai universal itu dan tidak perlu diperbandingkan dengan agama atau sistem politik yang lain.

Contoh paling tepat untuk mengidentifikasi kelompok atau negara penentang keras dominasi Barat adalah negara Iran.¹² Meletusnya Revolusi Islam Iran menjadi bukti nyata. Revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1979 merupakan sesuatu monumental dalam sejarah Iran, bahkan sejarah umat Islam atau sejarah dunia sekali pun, karena tradisi absolutisme politik dalam sistem pemerintahan monarki¹³ dapat digantikan dengan segera dengan sistem pemerintahan ulama bercampur dengan sistem demokrasi modern seperti yang terbentuk sekarang ini.

Revolusi Islam Iran telah memberikan karunia, berkah, dan keberhasilan yang begitu berharga bagi rakyat Iran. Revolusi ini telah menghadihkan nilai-nilai luhur seperti tuntutan kemerdekaan, kebangkitan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kemandirian. Nilai-nilai inilah yang mendorong rakyat Iran untuk terus berjuang memutus ketergantungan di bidang ekonomi, politik, dan budaya asing serta mewujudkan keadilan ekonomi dan kemajuan iptek.¹⁴ Naim Qassem, sekjen

¹² Iran, secara bahasa, berarti dataran Arya. Secara geografis letaknya berada di timur *Indo-Europeans* (tempat asal suku bangsa Arya.) Mereka bereksodus ke dataran Iran pada sekitar 2000 SM., sehingga merekalah nenek moyang bangsa Iran modern sekarang ini. Lih. Herodotus, *The Histories*, terj. Aubrey de Salincourt (London: Penguin Classics, 1996), 8.

¹³ Iran, sebelum revolusi tahun 1979 yang menggulingkan dinasti Pahlevi, adalah bangsa yang memunyai bentuk pemerintahan model monarki. Sejak jaman Cyrus yang mendirikan kerajaan *Archamenia* pada era kuno dan Dinasti Safawi serta Dinasti Qajar, sistem pemerintahan yang ada saat itu adalah monarki. Sebenarnya Dinasti Qajar sudah meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang mengarah pada bentuk pemerintahan yang lebih demokratis melalui Revolusi Konstitusional tahun 1906, akan tetapi dinasti yang menggantikan, yakni dinasti Pahlevi mengingkari konstitusi itu dan cenderung pada bentuk pemerintahan monarki-absolut.

¹⁴ Muhammad Alcaff, *Perang Nuklir?* (Jakarta: Zahra, 2008), 26.

¹¹ Montogomery Watt, *Islamic Fundamentalism*, 104.

Hizbullah, Lebanon, menggambarkan revolusi Iran seperti gempa bumi di seluruh Timur Tengah, memengaruhi peta aliansi dan hegemoni kekuatan luar negeri.¹⁵ Sementara itu, Henry Kissinger, mantan Menlu AS, menyebut Revolusi Islam Iran 1979 sebagai gempa bumi dahsyat, yang tidak hanya mengguncang Timur Tengah, bahkan seluruh dunia.¹⁶

Euforia hari-hari pertama pasca revolusi memicu kegairahan dan perasaan bangga yang kuat bagi banyak orang di Dunia Muslim. Penegasan Ayatullah Khomeini, sang pemimpin revolusi, bahwa revolusi Iran adalah Revolusi Islam, bukan cuma Syī'ī semata. Dan ajakannya kepada orang lain untuk mengikuti, mengundang inspirasi tidak hanya bagi ledakan militan Syī'ī di Saudi Arabia dan Teluk tetapi juga, pada awalnya, dukungan orang-orang Muslim dan organisasi-organisasi Sunnī. Ajakan ini tentu saja membuat panik dan prihatin bangsa Eropa dan Barat. Mereka khawatir revolusi Iran menjalar ke seluruh Dunia Islam, khususnya Timur Tengah, di mana itu berarti target ekonomis dan politis mereka di wilayah itu bisa gagal.

Kekhawatiran Barat ternyata menjadi kenyataan. Esposito misalnya menyebutkan, bahwa dampak awal dari revolusi Islam Iran, melampaui pentingnya revolusi tersebut di dalam negeri Iran. Dari Kairo sampai Kuala Lumpur, revolusi ini menjadi bukti yang nyata bagi mereka yang mencari penjelasan tentang kegagalan pemerintah mereka dan bagi mereka yang percaya bahwa melepas ketergantungan kepada kekuatan luar, lebih berdikari, dan penegasan kembali Islam, merupakan alternatif.¹⁷

Senada dengan itu, Ladan Boroumand dan Royan Boroumand, keduanya peneliti

dan sejarawan ternama Iran, menyebutkan bahwa pengaruh revolusi Islam Iran juga disebut-sebut oleh para anggota Jihad Islam Mesir yang menembak mati Presiden Anwar Sadat pada Oktober 1981. Otak mereka adalah seorang insinyur, Abdussalam Faraj, yang juga gemar mengutip Sayyid Qutb untuk membenarkan teror. Komplotannya—termasuk para opsir muda tentara yang melakukan penembakan—terilhami oleh model Iran, dan mengharapkan kematian Sadat akan memicu sebuah perlawanan massa di Kairo, seperti halnya yang terjadi di Teheran dua tahun sebelumnya.¹⁸

Dan yang paling kental pengaruh revolusi Islam Iran itu terjadi di Lebanon dengan Laskar berani matinya, Hizbullah. Mengenai hal ini, Sekjen Hizbullah, Naim Qassem memberi kesaksian: pengaruh revolusi Islam Iran ini dimanifestasikan melalui pengiriman pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran ke Lebanon setelah terjadinya invasi Israel, dengan misi melatih dan merekrut anak-anak muda yang bersedia memerangi kaum Zionis.¹⁹ Bahkan Muhammaad Husein Fadlallah, Pembina Spiritual Hizbullah, menyatakan, “Kita mesti bersumpah setia pada pemimpin revolusi Islam Iran dan kepada kaum revolusioner seperti sumpah kita kepada Tuhan sendiri, karena revolusi adalah kehendakNya sendiri.”²⁰

Revolusi Iran 1978-9 tampaknya adalah barometer bagi Sunnī maupun Syī'ī. Kemenonjolan ideologi dan kepemimpinan Islam revolusi ini memberinya nama ‘Revolusi Islam’ yang akan terus diingat. Keberhasilannya memobilisasi rakyat Iran

¹⁵ Naim Qassen, *Hizbullah: The Story from Within*, terj. ke Indonesia: *Blueprint Hizbullah: Rahasia Manajemen Ormas Islam Tersukses di Dunia* (Jakarta: Ufuk Press, 2008), 343.

¹⁶ Alcaff, *Perang Nuklir?*, 32.

¹⁷ Esposito, *Islam: The Straight Path*, 204.

¹⁸ Ladan Boroumand et al. (eds.), *America and the World: Debating the New Shape of International Politics* (Council on Foreign Relations), 351-2; lih. juga Charles Tripp, “Sayyid Qutb: The Political Vision,” dalam Ali Rahnema (ed.), *Pioneers of Islamic Revival*, 178-9; Gilles Kepel, *Jihad: The Trail of Political Islam* (UK, 2006), 122-3.

¹⁹ Qassen, *Hizbullah: The Story from Within*, 344.

²⁰ Ladan Boroumand, *America and the World*, 350.

secara efektif untuk melawan Syah Reza Pahlevi yang kuat, dan seolah tak terkalahkan, tampak mengabsahkan klaim-klaim aktivis Islam bahwa kembali kepada Islam akan dapat memuliakan jatidiri dan daya hidup agama, dan memungkinkan kaum Muslim, dengan hidayah Tuhan, untuk menerapkan pandangan hidup yang lebih otonom dan berdikari di luar kekuatan militer rezim dan sekutu-sekutu Barat.

Revolusi Islam Iran adalah revolusi dunia Islam secara keseluruhan, yang pengaruhnya melintasi berbagai negara-negara Timur Tengah, bahkan hingga Asia. Tapi pertanyaannya adalah mengapa revolusi yang terjadi di Mesir pada 11 Februari 2011 lalu, dalam rangka menggulingkan pemerintahan otoriter Hosni Mubarak, bukan revolusi Islam? Justru yang terjadi adalah revolusi rakyat: atas nama, suara, dan kepentingan rakyat Mesir. Fenomena ini tentu saja mengejutkan publik dan bahkan diperbincangkan secara serius oleh para akademisi dan sarjana terkemuka seperti Olivier Roy,²¹ Gilles Kepel, dan Asef Bayat.²² Ketiganya berkesimpulan bahwa revolusi yang terjadi di Timur Tengah seperti yang terjadi di Tunisia, Libya, Yaman, dan khususnya adalah di Mesir, merupakan revolusi rakyat, yang dalam tesis ini kemudian

disebut sebagai ‘revolusi pasca-Islamisme.’

Gelora revolusi yang didengungkan di negeri Piramida Mesir itu benar-benar jauh dari hingar-bingar Islam Politik atau Islamisme. Tidak terdengarnya yel-yel ‘dirikan negara Islam,’ ‘tegakkan syari‘at Islam,’ ‘Islam adalah agama sempurna,’ ‘gantung sistem kafir,’ dan jargon-jargon Islam lainnya, cukup membuktikan ketiadaan peran kaum Islamis dalam merebut tahta Mubarak. Di samping itu hal ini cukup membuktikan tesis Olivier Roy, Gilles Kepel, dan Asef Bayat, tentang kegagalan gerakan-gerakan Islam atau Islam politik.

Kekuatan Agama Islam (Ikhwān al-Muslimīn) dan Revolusi Kaum Muda di Mesir

Kaum muda dan masyarakat di Timur Tengah sejak akhir tahun 2010 dan hingga tahun 2011 ini bergolak luar biasa. Aksi revolusi di Mesir, yang menjadi fokus bahasan ini, berkenaan dengan revolusi di Tunisia yang menyebabkan jatuhnya Presiden Zine el-Abidine Ben Ali. Tumbangnyanya sang diktator menginspirasi demonstran di Afrika Utara dan Jazirah Arab. Orang menyebut revolusi di Tunis sebagai ‘Revolusi Melati,’ yang dipicu tewasnya seorang pedagang buah kaki lima, Mohammad Bouazizi yang melakukan aksi protes bakar diri di Kota Sidi Bouzid. Amarah rakyat Tunisia yang kecewa terhadap pemerintahan Ben Ali lalu memuncak. Demonstrasi berujung kerusuhan. Presiden Ben Ali lalu mengundurkan diri dan mencari suaka ke Arab Saudi.

Majalah *Foreign Policy* menganalisis kondisi Mesir beberapa tahun terakhir yang menggiring Mesir menuju jurang sama yang dihadapi rezim Ben Ali di Tunisia. Sudah selama tiga dekade rezim Hosni Mubarak berkuasa di Mesir, menurut majalah ini, dengan memanfaatkan seluruh undang-undang terkait kondisi darurat negara ini untuk memberikan keleluasaan kepada Mubarak mengotak-atik pelaksanaan pemilu

²¹ Professor di *European University Institute di Florence Paris* ini menulis artikel yang dimuat di *The New York Times* (21 Januari 2011) http://www.nytimes.com/2011/01/22/opinion/22iht-edroy22.html?_r=1 dengan judul “Where Were the Tunisian Islamists?” Dalam artikel tersebut Roy memertanyakan peran kaum Islamis Tunisia dalam menumbangkan rezim Zine el-Abidine Ben Ali. Roy berkesimpulan gerakan turun jalan yang dilakukan pemuda dan seluruh rakyat Tunisia merupakan gerakan murni rakyat atau revolusi rakyat, yang tidak mengatasnamakan Islam.

²² Asef Bayat adalah peneliti ternama untuk soal-soal Timur Tengah dan sosiolog di Universitas Illinois, AS. Dalam salah satu artikelnya yang dimuat di *Open Democracy: Free Thinking for the World* (8 Feb 2001) <file:///D:/my%20documents/Asrori/egypt-and-post-islamist-middle-east.htm%20%5Basep%20bayat%5D.htm> dengan judul “Egypt, and the Post-Islamist Middle East,” menyimpulkan tentang runtuhnya gerakan Islamis di Mesir yang digantikan dengan gerakan rakyat.

secara arbitrer.

Mubarak berusia 82 tahun dan menghadapi berbagai masalah kesehatan. Di sisi lain, persaingan antara Gamal Mubarak, putra Presiden Mesir, dan Omar Sulaiman, Ketua Dinas Rahasia Mesir, juga semakin menguat. Protes yang digelar secara nasional di Mesir yang dijuluki 'Hari Kemarahan' itu telah menjadi momok bagi rezim Mubarak, akhirnya menjatuhkan Mubarak. Betapa tidak, meski telah dilarang dan diancam hukuman, masyarakat enggan menghentikan aksi protes dan menuntut lengsernya rezim ala Fir'awn itu. Mubarak akhirnya jatuh 18 hari setelah gerakan revolusi 25 Januari, dicetuskan kaum muda Mesir, yang dikenal dengan Revolusi Nil.

Penggerak utama di balik aksi revolusi dan seruan demokrasi di Dunia Arab seperti Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, Maroko, Yordania, Bahrain dan Aljazair bukanlah generasi tua Islamis, melainkan kaum muda Islam. Dalam kasus Mesir, peran pemuda Ikhwān al-Muslimīn tak terbantahkan.

Gerakan kaum muda Mesir dan Tunisia ini melawan rezim yang menyandarkan kekuatan negara pada polisi, intelijen dan kelas komprador yang bersekutu dengan modal internasional, yang di Mesir maupun Tunisia telah gagal atau setidaknya kehilangan legitimasi.

Dalam kasus Mesir, seruan pemogokan umum Mesir dan Hari Kemarahan 25 Januari 2011 digerakkan oleh organisasi berbasis *Facebook* yang menamakan diri 'Gerakan 6 April,' suatu gerakan kaum muda. Gerakan 6 April dipimpin oleh Ahmed Maher Ibrahim, seorang insinyur sipil berusia 29 tahun, yang memanfaatkan situs *Facebook* untuk menyerukan pemogokan nasional pada tanggal 6 April 2008. Menurut laporan *New York Times* (2009) sekitar 800.000 orang Mesir, kebanyakan pemuda, adalah pengguna *Facebook* atau *Twitter*.

Dalam sebuah wawancara dengan Carnegie Endowment yang berbasis di

Washington, ketua Gerakan 6 April, Maher Ibrahim menyatakan, "Ini adalah gerakan pemuda pertama di Mesir yang menggunakan internet sebagai basis komunikasi seperti *Facebook* dan *Twitter*, dan kami bertujuan untuk memromosikan demokrasi dengan mendorong keterlibatan publik dalam proses politik." Maher Ibrahim juga mengumumkan bahwa Gerakan 6 April, bersama Asosiasi Nasional untuk Perubahan (NAC) bentukan El-Baradei, mendukung mantan Direktur Badan Atom Internasional PBB (IAEA) ini, El-Baradei sendiri, sebagai calon Presiden Mesir. NAC meliputi antara lain George Ishak, pemimpin dalam Gerakan Kefaya, dan Mohamed Saad El-Katatni, presiden blok parlemen dari Ikhwān al-Muslimīn yang kontroversial.²³

Kefaya ambil bagian dalam peristiwa penting Mesir yang tengah berlangsung, dan di belakang mereka ada Ikhwān al-Muslimīn yang mencoba bersikap 'hati-hati, bijaksana dan tidak haus kekuasaan.' Kata *Kefaya* itu sendiri berarti 'cukup!' Kefaya adalah nama resmi Gerakan Perubahan di Mesir, didirikan pada tahun 2004 oleh intelektual Mesir, Abū al-'Alā Mādī, sekaligus pemimpin partai al-Wasaṭ, yang dilaporkan bentukan Ikhwān al-Muslimīn.

Kefaya diciptakan sebagai koalisi yang dipersatukan oleh kepentingan untuk mengakhiri pemerintahan Mubarak. Kefaya sebagai bagian dari Gerakan 6 April dikapitalisasi awal dalam situs-situs jejaring sosial baru dan teknologi digital sebagai sarana utama mobilisasi. Secara khusus, *blogging* politik, posting di *youtube* dan fotografi yang

²³ Lih. F. William Engdahl, "Creative Destruction for a 'Greater Middle East?'" *The Guardian*, Wednesday, February 9, 2011; Mahdi Darius Nazemroaya, "Plans for Redrawing the Middle East: The Project for a 'New Middle East,'" *Global Research*, November 18, 2006. Protes yang begitu besar dan terorganisir dengan baik oleh gerakan kaum muda ini memaksa Mubarak untuk meminta kabinetnya mengundurkan diri dan menunjuk wakil presiden baru, Jenderal Omar Suleiman, seorang mantan Menteri Intelijen, namun Suleiman juga tersingkir.

terampil benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana kampanye. Pada reli bulan Desember 2009, Kefaya telah mengumumkan dukungan pencalonan Muhammad El-Baradei untuk pemilu 2011 Mesir.²⁴

Gerakan angkatan muda Mesir ini membuktikan tingginya kesadaran dan kematangan politik pemuda dan rakyat melawan rezim otokrasi. Kaum muda di Mesir terdiri dari Muslim sekuler dan agama, dan Kristen, nasionalis, kaum kiri dan Islamis, kaum miskin dan kelas menengah, yang bersatu melawan otokrasi. Kaum muda yang memiliki keragaman ideologi dan agama itu mampu mengatasi perpecahan dan perbedaan yang ada, dan sebagai gantinya, mereka membangun kesatuan revolusioner, menjadi kekuatan gerakan dalam keragaman.

Akibatnya, upaya oleh kontra-revolusi dari Mubarak maupun Ben Ali untuk menggunakan kekuatan loyalis, seraya menghasut kekerasan dan perpecahan di antara kaum muda revolusioner itu telah gagal total. Upaya rezim otokrat untuk memecah dan menaklukkan kaum muda dengan mengerahkan polisi, intelijen dan loyalis istana seraya menuduh bahwa kelompok muda reformis ini hanya kelompok radikal yang mencoba untuk mengambil alih kekuasaan, juga gagal. Sebaliknya, angkatan muda yang berlatar belakang pluralistik bersikeras bahwa mereka menginginkan demokrasi dan kebebasan untuk semua.²⁵

Generasi muda Mesir ini memiliki *backbone* yakni Ikhwān al-Muslimīn, kaum Nasionalis sekuler dan Liberal, serta umumnya berpendidikan tinggi, punya kemampuan menyuarakan ketidakpuasan dan

menaruh harapan bagi masa depan yang lebih baik. Di atas segalanya, pemuda di Mesir, Tunis dan negara Arab lain menyadari bahwa mereka dapat mencapai kehidupan yang lebih baik hanya dengan cara membersihkan negara mereka dari elit penguasa rakus yang telah melembagakan korupsi dan nepotisme dan tidak peduli pada masalah-masalah rakyat pada umumnya.

Para pemuda Mesir banyak yang kembali kepada agama Islam yang toleran, yang mempromosikan kebebasan pribadi dan nilai-nilai yang kompatibel dengan praktik-praktik demokratis. Generasi muda ini sudah berkenalan dengan media sosial dan internet, sebagaimana kaum muda di belahan bumi lainnya.²⁶

Asef Bayat, direktur akademis International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) dan Profesor ISIM di Leiden University, Belanda, mencatat, revolusi yang sedang terjadi di Mesir 2011 ini tidak diprakarsai oleh kelompok Islam Ikhwān al-Muslimīn ataupun bertujuan membuat revolusi Islam, seperti yang ditakutkan oleh pihak Barat, melainkan oleh kaum muda, dengan karakter gerakan populer dan sekuler.

Harus dicatat bahwa dalam waktu kurang dari dua bulan, jutaan pemuda di Mesir menggunakan cara-cara non-kekerasan, telah membebaskan Timur Tengah dari dua kekuasaan otokrasi yang paling represif. Demikian pula, 18 hari demonstrasi anti-

²⁴ F. William Engdahl, 'Creative Destruction for a 'Greater Middle East''?'; Mahdi Darius Nazemroaya, 'Plans for Redrawing the Middle East: The Project for a 'New Middle East.'''

²⁵ Abdul Ilah Al-Bayaty and Hana Al-Bayaty and Ian Douglas, "Egypt: Only Democracy is Legitimate," *Global Research*, February 10, 2011, 1-3; lih. Juga "Will Tunisia Transition from Tyranny into Democratic Despotism?," *Global Research*, February 14, 2011, 1-6.

²⁶ Eric Davis, "The U.S. must now think democratically in the Middle East," *The Daily Star* (Lebanon, Tuesday, February 15, 2011.) Davis menulis, "The main driver behind the calls for democracy is not the older generation of Islamists, but rather youths—often well-educated youths—who lack jobs, the ability to voice discontent, and any hope for the future. They are less concerned with religion than with employment, raising a family, and leading a stable life. In the age of the Internet and social media, these youths can compare the freedoms they lack with those their counterparts enjoy elsewhere in the world." Lih. Eric Davis, *Taking Democracy Seriously in the Middle East* (Cambridge University Press, 2011.)

Mubarak di Tahrir Square membawa bersama ribuan umat Islam dan Kristen nasionalis, liberal dan sosialis, muda dan tua, pria dan wanita, yang akan mencegah al-Ikhwān al-Muslimīn dari penulisan undang-undang syari'ah ke dalam konstitusi Mesir baru.

Kita belum tahu adakah kebijakan dan formula dukungan ekonomi-politik dunia internasional bagi demokratisasi di Mesir dan Timur Tengah, terutama di kalangan pemuda di wilayah ini, di mana jutaan pemuda berusia antara usia 14 dan 29 jelas rentan dan mudah bergolak di tengah kesenjangan, korupsi dan kemiskinan.

Sebagian besar dari para pemuda Mesir itu membenci radikalisme agama karena mereka tahu itu menghasilkan intoleransi, kekerasan, dan bentuk-bentuk baru represi politik dan budaya. Para pemuda yang kembali kepada agama semakin mencari Islam toleran yang mempromosikan kebebasan, hak-hak individu dan nilai-nilai kompatibel dengan praktik-praktik demokratis. Di atas segalanya, para pemuda Mesir menyadari bahwa mereka dapat mencapai kehidupan yang lebih baik hanya dengan cara membersihkan negara mereka dari elit penguasa rakus yang telah melembagakan korupsi dan nepotisme dan tidak peduli pada masalah-masalah rakyat pada umumnya.

Asef Bayat melihat, revolusi massa atau *people power* di Mesir (dan Tunis) lebih mengingatkan kita pada revolusi demokratis dari Eropa timur-tengah pada tahun 1989. Di Mesir, tidak ada pengusiran terhadap orang asing, Barat, atau Amerika. Selain itu, penting diketahui bahwa pemberontakan tidak dipandu oleh organisasi tunggal, ideologi, atau kepribadian—apalagi boneka Islam. Sebaliknya, ini pergolakan monumental terdiri dari organisasi politik dan sipil yang berbeda, dengan afiliasi keagamaan, sekuler, dan politik berbeda, dan 'kepemimpinan' kolektif, dan setidaknya ada satu slogan atau nyanyian, disuarakan oleh kaum muda dan orang banyak di Kairo Tahrir Square pada

28 Januari 2011, yang sangat berarti, yakni "revolusi kita adalah sipil, bukan kekerasan, atau agama" (*al-tsawratunā madaniyyah, lā sayfiyyah, lā dīniyyah.*)²⁷

Sejak aksi pertama anti-pemerintah di Mesir, respon Mubarak terkesan mengabaikan demonstrasi kaum muda prodemokrasi dan hak asasi manusia, yang jumlahnya pada saat itu masih puluhan ribu orang. Sebagai pemimpin yang memegang kendali penuh atas pemerintahan, parlemen, dan penegakan hukum, Mubarak tidak pernah memandang kaum muda sebagai lawan politik yang sepadan. Karena itu ia hanya menanggapi demonstrasi kaum muda secara dingin. Namun sikap dingin yang diambil Mubarak terhadap tuntutan kaum muda berubah menjadi petaka politik yang mampu mengakhiri kekuasaannya secara tidak terhormat. Abdul Munim Saeed dalam harian *Al-Ahrām* menegaskan sejak 1995 kaum muda mengalami peningkatan secara kuantitas. Jumlah mereka pada 2010 sekitar 23% dari total jumlah penduduk sekitar 85 juta orang. Jumlah kaum muda tercatat mencapai 19,8 juta. Usia mereka antara 18 tahun dan 29 tahun.²⁸

Pertumbuhan kalangan muda tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas sumber daya dan kemampuan mereka dalam membangun komunikasi publik. Fenomena kebangkitan kaum muda di Mesir dapat digambarkan dalam tiga hal. *Pertama*, kebangkitan kaum muda kelas menengah yang terjun dalam dunia bisnis. *Kedua*, kebangkitan kaum muda terpelajar. Sudah sejak lama, Mesir memberlakukan pendidikan gratis sejak dini hingga perguruan

²⁷ Asef Bayat, "A Post-Islamic Middle East?: An Opinion," *UnionBook*, 15 Februari 2011; Asef Bayat, "Egypt and the post-Islamist Middle East," 8 February 2011 <http://www.opendemocracy.net/asef-bayat/egypt-and-post-islamist-middle-east>.

²⁸ Zuhairi Misrawi, "Revolusi Kaum Muda di Mesir," *Media Indonesia*, Rabu, 16 Februari 2011. Zuhairi adalah seorang analis politik Timur Tengah dan saksi revolusi di Mesir.

tinggi. Setiap warga Mesir dengan mudah mendapatkan pendidikan hingga tingkat doktoral dengan subsidi penuh dari negara. Kaum muda yang menempuh pendidikan kejuruan mencapai 36%. Mereka yang melanjutkan perguruan tinggi mencapai 28%, dan yang perlu mendapatkan catatan khusus, kaum muda yang memunyai minat untuk melanjutkan pendidikan tinggi semakin besar. *Ketiga*, kaum muda yang aktif menggunakan media sosial, khususnya *Facebook* dan *Twitter*. Mereka adalah kaum muda yang mampu membangun jaringan sosial yang luas, tanpa batas. Ketiga hal tersebut merupakan pilar-pilar yang telah berhasil melahirkan revolusi 25 Januari di Mesir.²⁹

Begitu besar peran kaum muda, bukan Ikhwān al-Muslimin, dalam revolusi di Mesir. Karena itu, perkiraan para pengamat Barat di media bahwa kelompok Ikhwān al-Muslimīn dipastikan akan memegang kekuasaan pasca-Mubarak boleh jadi adalah omong kosong belaka. Ikhwān al-Muslimīn sendiri belum tentu memenangi pemilu nanti. Tetapi mereka mungkin memang akan ikut berperan dalam pentas politik Mesir.

Jatuhnya Presiden Tunisia Zine el-Abadine Ben Ali yang represif otokratis dan korup menandai presiden Arab pertama yang dipaksa keluar dari istana—disusul Mubarak di Mesir kemudian—oleh demonstrasi sipil non-kekerasan. Mungkin yang paling penting, dorongan dari gerakan yang menyebabkan jatuhnya adalah tindakan kaum muda yang terus berdemonstrasi menentang rezim itu selama lebih dari sebulan. Apa yang paling signifikan di sini adalah peran pemuda dalam menjatuhkan seorang pemimpin Arab.

Di masa lalu Ikhwān al-Muslimīn dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Mesir dan dianggap sebagai organisasi ekstremis Islam oleh sebagian besar orang Barat. Bahkan Senator John McCain dari

Partai Republik AS menyatakan, Ikhwān al-Muslimīn adalah “kelompok ekstremis yang tujuan utamanya adalah penerapan hukum syari‘ah” di Mesir. McCain juga menegaskan, melibatkan Ikhwān al-Muslimīn dalam pemerintahan transisi yang akan dibentuk di Mesir adalah “sebuah kesalahan besar, dan itu adalah kelompok yang antidemokrasi dari atas sampai bawah, terutama menyangkut hak-hak perempuan.”

Pasca Islamisme

Akademisi Perancis, Olivier Roy dalam tulisannya “Post-Islamic Revolution” (diterjemahkan dan dipublikasikan 17/2/11 oleh Georgio Comminos, *the European Institute* dari esai Oliver Roy di koran *Le Monde*) menyiratkan bahwa gerakan revolusi pemuda yang menumbangkan Presiden Ben Ali di Tunisia dan menjatuhkan Presiden Hosni Mubarak di Mesir, juga gerakan serupa di negara Arab lainnya seperti Libya, Yaman, Yordania dan sebagainya, tidak menampakkan ciri Revolusi Islam. Juga tidak ada seruan untuk menegakkan negara Islam atau Kekhalifahan Islam, dan tidak kedengaran jeritan, “Enyahlah Amerika/Barat!” dalam skala massif.³⁰

Para analis dan media melihat, organisasi Islam seperti Ikhwān al-Muslimīn hadir dalam gerakan prodemokrasi ini, meskipun mereka hanya satu segmen dari spektrum gerakan sangat luas. Ikhwān Muslimīn, yang disebut-sebut sebagai kelompok oposisi Islam terbesar dan paling terorganisir, tidak memimpin pemberontakan. Kelompok Ikhwān Muslimīn bahkan ambivalen dalam berpartisipasi dalam demonstrasi jalanan di

²⁹ Zuhairi Misrawi, “Revolusi Kaum Muda di Mesir.”

³⁰ Olivier Roy, “Post-Islamic Revolution” (diterjemahkan dan dipublikasikan 17/2/11 oleh Georgio Comminos, *the European Institute* dari esai Oliver Roy di koran *Le Monde*, Pebruari 2011; Ali Eteras, “Post Islamism,” *The Guardian*, Wednesday 31 October 2007, diakses www.guardian.co.uk, pukul 09.00 GMT; mengenai kegagalan Islamisme lih. Olivier Roy, *The Failure of Political Islam* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994), terj. Carol Volk dari bahasa Perancis ke Inggris.

hari-hari awal, sebagian besar karena takut akan aksi pembalasan negara. Selama tiga dekade, Ikhwān al-Muslimīn telah menahan diri dari konfrontasi melawan negara era Hosni Mubarak.

Kaum muda Ikhwān al-Muslimīn tidak berusaha memberikan sebuah warna religius. Sebaliknya, mereka malah bergabung dengan koalisi kelompok oposisi yang terdiri dari berbagai aliran politik dengan beraneka ragam ideologi seperti nasionalis, sekuler, kiri, dan sipil. Ikhwān al-Muslimīn sedang dalam pergolakan transformasi ideologis mengingat ada debat internal yang melibatkan perselisihan antara penjaga tua dan ‘muda’ dalam kepemimpinan gerakan selama beberapa tahun terakhir.

Revolusi di Dunia Arab ini digerakkan generasi muda Muslim dan non-Muslim (minoritas) yang memiliki mentalitas pluralis—di mana kelompok Islam dan Kristen serta liberal, bisa berjuang bersama—mungkin karena mereka juga lebih individualistis. Golongan muda Muslim itu lebih memilih Islam yang lebih substantif. Mereka adalah, generasi muda yang beroperasi dengan ide gerakan populer dan politik sekuler.

Olivier Roy dalam buku fenomenalnya *The Failure of Political Islam* (1996)³¹

³¹ Penelitian Olivier Roy itu menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut oleh kalangan Muslim karena beberapa alasan. *Pertama*, karena dalam penelitian Roy terpapar bagaimana fenomena Islam politik menyeruak dalam dunia Islam sebagai artikulasi imajinasi politik Islam yaitu yang tergambar dalam sebuah pernyataan “dalam Islam tidak ada pemisahan antara politik dan agama.” Ini berguna untuk melakukan reinterpretasi terhadap ajaran Islam, khususnya yang bersinggungan dengan isu-isu politik. *Kedua*, Roy menggambarkan secara empirik dan kongkret bagaimana fenomena gerakan Islamis kontemporer menggeliat di beberapa negara Muslim dengan segala aktivitas dan isu politik yang diusungnya. Fenomena gerakan itu memberikan kontribusi positif sekaligus negatif bagi dunia dan masyarakat Islam. Inilah lahan evaluasi kritis bagi kalangan Muslim untuk merumuskan kembali artikulasi Islam politik di dunia Islam, sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang humanis, toleran dan

mengungkapkan bahwa aktivitas-aktivitas Islam yang berorientasi politik atau ‘Islam politik’ telah gagal menawarkan model masyarakat baru maupun masa depan dunia Islam yang cerah sesuai dengan yang diharapkan.³² Senada dengan itu, Gilles Kepel dalam *Jihad: The Trail of Political Islam* (2004) membuat kesimpulan yang sama bahwa kegagalan aktivisme Islam di belahan dunia, terutama di dunia Timur Tengah, karena disebabkan lebih menunjukkan metode ‘kekuatan dan keganasan power’ dalam proses mewujudkan cita-citanya.³³

Sementara itu, Asef Bayat dalam *Making Islam Democratic: Social Movements and Post-Islamist Turn* (2007), lebih gamblang memaparkan kegagalan kaum Islamis di Mesir. Kemunculan post-Islamisme atau Pasca-Islamisme, menurut Bayat, sebagai satu kondisi gerakan Islam yang berkomunikasi dengan bahasa semasa dan menangani hal-hal semasa yang bukan menurut istilah yang biasa dengan gerakan Islam. Pasca-Islamisme adalah satu bentuk paling baru dari gerakan Islam terkini yang mencoba mengambil sepenuhnya wacana baru yang bersifat demokratis dan lebih beraroma sekuler dan liberal. Sikap dan sifat seperti inilah yang kemudian menjadikan mereka Pasca-Islamisme.³⁴

Olivier Roy menyebut revolusi pemuda di Mesir dan Tunisia itu sebagai gerakan pasca-Islamisme, ialah gerakan Islam semakin menyesuaikan diri dengan ruang demokrasi, HAM dan situasi-zamannya, sehingga tak lagi menjadi gerakan Islam seperti yang dikenali sebelumnya semisal model Gerakan Ikhwān Muslimīn ala Ḥassan al-Bannā dan Sayyid Quṭb atau Ayatullāh Khomeini di Iran.

liberatif.

³² Olivier Roy, *The Failure of Political Islam* (Harvard University Press, 1996), 7.

³³ Gilles Kepel, *Jihad: The Trail of Political Islam* (UK, 2006.)

³⁴ Asef Bayat, *Making Islam Democratic: Social Movements and Post-Islamist Turn* (2007)

Olivier Roy melihat demonstrasi kaum muda di Mesir, Tunisia dan negara Arab lainnya, tidak lagi menggemakan Islamisme sempit, suatu pertanda mereka belajar dari kegagalan Islam politik sebelumnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita, di mana Islamisme hanya menimbulkan perpecahan internal dan mengkhawatirkan rakyat banyak serta mengundang respon Barat secara berlebihan. Rezim yang memerintah di Tunisia (Ben Ali) dan Mesir (Mubarak) itu, menurut Oliver Roy, lahir dari politik setempat, dan bukan boneka Perancis atau penjajahan baru Amerika Serikat, meski kedua rezim berhubungan erat dengan Barat.

Dengan aksi gerakan kaum muda yang mengusung isu bersama seperti keadilan, demokrasi dan kebebasan, maka revolusi pasca Islamisme itu menemukan bentuk dan gaungnya yang cepat beresonansi ke negara-negara kawasan yang dicekam mahalanya harga pangan, korupsi dan otokrasi.

Olivier Roy melihat kegagalan gerakan Islamisme menjatuhkan rezim-rezim sekuler yang berkuasa di Mesir dan Tunisia menyiratkan kegagalan projek Islam-politik (*political Islam*.) Untuk sebagian besar nampaknya hal itu merangsang kaum muda Muslim menempuh arus sosial pasca Islamisme dan *ipso facto*, proyek 'pasca Islamisme' digandrungi dan diafirmasi.

Wacana pasca Islamisme juga dikemukakan oleh Asef Bayat, akademisi Universitas Illinois AS, terutama dalam menelaah revolusi di Tunisia dan Mesir. Asef Bayat mengemukakan gagasan pasca-Islamisme secara mendalam dan menyebut kegagalan Islamisme dalam era globalisasi selama ini, untuk sebagian besar menjadi pendorong munculnya gerakan pasca Islamisme. Bagi kaum muda Mesir dan Dunia Arab, kini gerakan pasca Islamisme dianggap lebih kontekstual, rasional dan realistis.³⁵

³⁵ Lihat, Asef Bayat, *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn* (Stanford: Stanford University Press, 2007.)

Gerakan revolusi pemuda di Mesir dan Timur Tengah ini merupakan gerakan populer pasca-ideologi Islamisme, dan memiliki karakter demokratis, yang mewakili gerakan populer masa pasca-Islamisme. Mereka berjuang untuk mencapai keadilan sosial, menegakkan martabat manusia, dan menginginkan bentuk pemerintahan demokratis yang dapat melindungi hak-hak fundamental warga negara, dan Asef Bayat menyebutnya gerakan pasca Islam di Timur Tengah.³⁶

Dalam hal ini, pasca-Islamisme menurut Asef Bayat merupakan suatu respon gerakan Islam dalam menghadapi masalah dan tantangan zaman, namun dalam menangani masalah dan tantangan kekinian itu, para aktivis dan intelektual gerakan itu tidak lagi menyebut dirinya dengan istilah yang biasa dikenal sebagai 'gerakan Islam' dalam karakter dan corak yang lama.

Akhir-akhir ini, pasca-Islamisme atau pasca Islamis di Mesir dan Dunia Islam secara umum bergerak lebih jauh lagi, sebab ia merupakan bentuk baru gerakan Islam yang mengambil sepenuhnya wacana baru dan mengadopsi demokrasi, menjadi lebih liberal dan menjadikan mereka lebih inklusif serta bergerak dalam kerangka negara-bangsa masing-masing.

Tesis pasca-Islamisme memang mendominasi narasi sebagian besar media dan akademisi Barat dalam liputan dan analisis mengenai revolusi pemuda-Mesir.

Para akademisi dan media Barat memiliki satu pandangan hampir sama atau memiliki konsensus hampir sama, yakni bahwa gerakan Islamisme tidak berperan menonjol dalam aksi demonstrasi dan protes di Mesir (juga Tunisia), sebab gerakan yang mengemuka justru revolusi populer dan 'sekuler' serta digerakkan sepenuhnya oleh kaum muda dan masyarakat yang bebas dari pengaruh ideologi

³⁶ Asef Bayat, "A Post-Islamic Middle East?" [Open Democracy], opinion, *UnionBook*, 15/2/ 2011, <http://www.opendemocracy.net/asef-bayat/egypt-and-post-islamist-middle-east> diakses pada 16/2/2011 pukul 11.20.

Islam, partai Islam atau identitas politik Islam dengan watak dan corak lama. Ini jelas sangat berbeda dari revolusi Iran 1979.

Generasi muda Muslim muda di Mesir kini meyakini bahwa pemerintah baru, pasca diktator Mubarak di Mesir (dan Ben Ali di Tunisia), yang bakal mendapat dukungan masyarakat internasional ialah pemerintahan baru yang mewakili semua golongan dan kelompok (*broad-based*) dan liberal, dengan peranan gerakan Islam yang tidak terlalu dominan. Dengan demikian, kekhawatiran dan kebimbangan banyak disuarakan AS/Barat mengenai potensi gerakan Islam untuk menguasai dan memonopoli kekuasaan di Mesir dan Tunisia, tidak memunyai cukup alasan dan dasar apapun.

Persoalan mengenai peranan Partai al-Nahḍah di Tunisia, menyusul tumbanganya Ben Ali, dan Ikhwān Muslimīn di Mesir pasca Mubarak, akhirnya mudah terjawab dengan realitas baru pasca Islamisme yang bersifat *broad-based* dan demokratis itu.

Partisipasi gerakan Islam di Tunisia dan Mesir untuk sebagian besar bergantung pada perubahan yang berlaku dalam proses demokrasi kedua negara bersangkutan, yang seyogianya mampu melaksanakan pemilu yang demokratis, adil dan kredibel serta pembentukan pemerintahan baru pasca pemilu yang semestinya bisa berjalan lebih baik dibandingkan era kediktatoran.

Skenario yang paling realistis dan tidak dapat dielakkan ialah bahwa golongan Muslim seperti Ikhwān Muslimīn di Mesir dan Partai al-Nahḍah di Tunisia akan bekerja sama dalam sebuah pemerintahan koalisi bersama kaum liberal dan berhaluan kiri.

Dalam kasus ini, Ikhwān Muslimīn (Mesir) dan al-Nahḍah (Tunis) diprediksi akan bersikap realistis (terpaksa atau tidak), dalam hal berbagi peran dan kekuasaan (*power sharing*) dalam pemerintahan baru di masing-masing negara. Ikhwān dan al-Nahḍah bisa mengikuti contoh dan model pasca-Islamis di Turki yakni Partai Keadilan dan Pembangunan

(AKP) di Turki, yang mengambil haluan berbeda dari Partai Islam yang melibatkan tokoh-tokoh AKP sebelumnya.

Dalam hal ini, kalau kita lihat perbandingan Mesir dan Turki, sekiranya Ikhwān Muslimīn memperoleh peran dan kekuasaan di pemerintahan baru Mesir nanti, isu besar akan dihadapi ialah hubungan dan perjanjian damai dengan Israel.

Dalam kasus Turki, hal ini tidak membawa masalah bagi AKP yang memerintah Turki, karena tidak ada perubahan dalam kebijakan mengenai hubungan Turki dan Israel. Mesir bisa belajar dari Turki dalam soal ini.

Nampaknya, mulai tumbuh pengertian di kalangan gerakan Muslim pasca Islamisme di Mesir, Timur Tengah atau di manapun bahwa mereka harus mampu melakukan obyektivikasi dan konstektualisasi—meminjam perspektif cendekiawan Muslim Kuntowijoyo—terutama dalam berdialektika dan bersentuhan dengan masalah dan tantangan setempat dan semasa, dalam upaya mengimbangi unsur-unsur esoterik agar gerakan pasca Islamisme itu tidak terpinggirkan dari arus utama. Ini penting karena wacana lama para Islamis tidak berkemampuan membentuk gerakan Islam yang mampu beradaptasi dengan medan politik yang lebih liberal dan kompleks.

Untuk itu, nampak ada kesadaran baru di kalangan Muslim, terutama generasi muda di Mesir, Tunisia, Libya, Yaman, dan seterusnya bahwa gerakan pasca Islamisme harus mampu mencerna dan membentuk pemahaman isu-isu utama dunia dewasa ini seperti HAM, keadilan, kesetaraan, demokrasi dan kebebasan, agar tidak menjadi gerakan kaum Muslim yang terasing dan terisolasi dalam menghadapi medan politik baru yang lebih kompleks, liberal dan menuntut sofistikasi yang lebih tinggi.

Sekarang ini kita melihat kebangkitan sebuah tatanan pasca Islamisme di kalangan Muslim. Nampak sekali sebuah generasi baru Muslim telah menemukan cara untuk

mendamaikan demokrasi liberal dengan Islam. Mereka telah berhenti membuat organisasi-organisasi keagamaan yang bertujuan melakukan dakwah (penyiaran Islam) secara sempit. Mereka telah terorganisir sebagai kekuatan partai politik sipil dengan kerangka kerja berdasarkan kesetaraan dan pluralisme.

Pasca Islamisme, karena itu, adalah pengakuan bahwa walaupun agama memberikan keselamatan dalam kehidupan akhirat, politiklah yang akan lebih menentukan kesejahteraan dalam kehidupan dunia.

Dewasa ini, kelompok-kelompok pasca Islamisme sedang bekerja di Dunia Arab seperti Mesir, Turki, Tunisia, Libya sampai Pakistan. Dengan kata lain, Islam Politik tengah berada di tahapan ketiganya di mana babak pertama merupakan babak revolusi; babak kedua masih berwatak metodis sekaligus supremasis; dan ketiga bercorak pasca Islamisme (Ali Eteraz, *Post-Islamism*, 2010.) Gerakan pasca Islamisme yang akan datang berkomitmen terhadap proses demokrasi, dan kaum Muslim berhenti memandang diri mereka sebagai sebuah gerakan keagamaan yang sempit, sebaliknya mengambil sebuah program politik sipil yang demokratis.

Kasus Mesir (Tunis, Libya dan seterusnya) di Timur Tengah belakangan ini merefleksikan kuatnya spirit pasca revolusi Islam atau pasca Islamisme di kalangan masyarakat sipil Dunia Arab. Sejatinya, itu isyarat kuat bahwa gerakan agama (Ikhwān Muslimīn, al-Nahḍah dan organisasi gerakan sejenisnya) maupun masyarakat Arab sudah berubah akibat pembangunan dan modernisasi, akibat masalah ketidakadilan, kemajuan ilmu dan teknologi, revolusi informasi, dan globalisasi seiring perkembangan zaman, sehingga Dunia Arab tidak bisa lagi dijadikan kekecualian dalam konteks demokrasi sekuler dan pluralisme di era globalisasi dewasa ini.

Revolusi pemuda dan *people-power* di Mesir mencerminkan bahwa masyarakat Arab itu kehilangan minat dalam utopia mengenai negara Islam, dan kaum 'Salafi' di dalamnya lebih fokus pada upaya memertahankan substansi ajaran agama dan nilai-nilai, tetapi tidak memiliki agenda politik menciptakan negara Islam atau Kekhalifahan Islam. Inilah fakta bahwa masyarakat Mesir dan masyarakat Timur Tengah, untuk sebagian, sudah bergerak dalam arus perubahan.

Simpulan

Pemaparan di atas membuktikan ketidakbenaran kesimpulan sebagian akademisi dan kekuatan Barat (AS, Israel, dan negara-negara Eropa) yang tengah mendominasi dunia, yang meyakini bahwa pengaruh Revolusi Islam Iran 1979 telah menjalar ke seluruh wilayah Timur Tengah, tak terkecuali Mesir.

Tentu saja kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan. Hal ini bisa ditandai dengan munculnya Islam Politik, yang kemudian disebut Islamis, di beberapa negara, termasuk di Mesir dengan kehadiran Ikhwān al-Muslimīn di bawah kepemimpinan Ḥassan al-Bannā. Pada beberapa dekade lalu, meskipun keberadaan Ikhwān al-Muslimīn terus direpresi sejak pemerintahan Gamal Abdul Nasr hingga Hosni Mubarak, mereka tetap eksis membangun kekuatan meskipun harus menempuh jalan sembunyi-sembunyi, yang tujuannya adalah menegakkan syari'at Islam secara *kāffah*. Hal inilah dianggap oleh sebagian akademisi di atas bahwa Ikhwān al-Muslimīn masih memiliki daya ancam.

Namun kenyataannya justru berbalik seratus persen. Revolusi Mesir Februari 2011 sama sekali tidak dimunculkan oleh gerakan 'Islam-politik' maupun 'Islam-ideologis' semacam Ikhwān al-Muslimīn, melainkan murni gerakan baru kini disebut 'pasca-Islamisme.'